

SISTEM KERAJAAN BALANIPA DI POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIA

Muh. Arfan¹ Budiarti² Nila Sastrawati³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: muh77747@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this research is to reveal the historical facts, values and culture of the kingdom of Balanipa. The unique characteristics of the kingdom that combine the concepts of democracy and deliberation are a special attraction. The values are related to religiosity, society, regional culture and traditions, government systems, and the concept of Siyasa Syar'iyah. The method used in this research is a qualitative field (field research) with a historical approach and seeks to reveal how the system of the Balanipa Kingdom in Polewali Mandar is mainly in the Siyasa Syar'iyah Perspective. This research was conducted by collecting a number of data obtained from informants in the field to find various facts or social phenomena, then the author will analyze them and try to formulate theoretically based on what is observed. In the implementation of field research, observations, documentation and interviews were carried out. The data from the literature study and the results of field studies are presented as research findings, abstracted to obtain complete information, and interpreted to produce knowledge for drawing conclusions. The results in this study are historical evidence of the acculturation value of the royal government system and democracy as the government system of the Republic of Indonesia. In general, it is concluded that the concept of miniature Indonesia has been implemented by the Kingdom of Balanipa..

Keywords: Balanipa Kingdom; Siyasa Syar'iyah; Values and Culture.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap fakta historis nilai dan budaya kerajaan balanipa. Karakteristik unik kerajaan yang memadukan dengan konsep demokrasi dan musyawarah menjadi daya Tarik khusus. Adapun nilai-nilai tersebut terkait religiusitas, kemasyarakatan, budaya dan tradisi daerah, system pemerintahan, serta konsep Siyasa Syar'iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan historis dan berusaha untuk mengungkap bagaimana sistem Kerajaan Balanipa di Polewali Mandar utamanya dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, kemudian penulis akan menganalisisnya dan berupaya merumuskan secara teoritik berdasarkan apa yang diamati. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan

Muh. Arfan, Budiarti, Nila Sastrawati, "Sistem Kerajaan Balanipa di Polewali Mandar Perspektif Siyasa Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 336-346.

informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah adanya bukti sejarah nilai akulturasi system pemerintahan kerajaan dan demokrasi sebagaimana system pemerintahan Republik Indonesia. Secara umum disimpulkan bahwa konsep miniatur Indonesia sudah diterapkan oleh Kerajaan Balanipa.

Kata Kunci: Kerajaan Balanipa; Siyash Syar'iyah; Nilai dan Budaya.

PENDAHULUAN

Manusia yang hidup berkelompok dalam sebuah entitas memerlukan sistem pemerintahan untuk menjaga ketertiban serta ketentraman di dalam kelompok masyarakat tertentu. Pada hakikatnya, sistem pemerintahan adalah pelayanan untuk masyarakat, dan orang-orang yang berada dalam tatanan tersebut bertugas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkannya setiap yang dipimpin itu tetap berada dalam satu kesatuan. Pemerintahan sejatinya adalah sebuah organ yang memiliki wewenang untuk memproses pelayanan publik serta kewajiban memperoleh pelayanan publik dan kewajiban mendapatkan pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya yakni pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.¹ Muhadam Labolo mengartikan pemerintahan sebagai upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.²

Dewasa ini, manusia mengenal dan menerapkan berbagai macam sistem pemerintah untuk dianut dan diaplikasikan pada setiap teritorial mereka sesuai dengan apa yang masyarakatnya kehendaki. Jimly Asshiddiqie menyederhanakan sistem pemerintahan menjadi empat model, yakni model Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Swiss. Amerika Serikat menganut sistem presidensial. Hampir semua negara di benua Amerika, kecuali beberapa seperti Kanada, Meniru Amerika Serikat dalam hal ini. Di benua Eropa dan kebanyakan negara Asia pada umumnya menggunakan model Inggris, yaitu sistem parlementer. Akan tetapi, Prancis memiliki model tersendiri yang bersifat campuran atau yang biasa disebut hybrid system. Pada umumnya negara-negara bekas jajahan Prancis di

¹ Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003): h. 6.

² Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2007): h. 24.

Afrika menganut sistem campuran itu. Selain ketiga model itu, yang agak khas adalah Swiss yang juga mempunyai Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi mereka itu dipilih dari dan oleh tujuh orang anggota Dewan Federasi untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun. Sebenarnya ketujuh orang anggota Dewan Federal itulah yang secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Swiss ini biasa disebut sebagai Collegial system yang sangat berbeda dengan tradisi presidentialisme atau parlemtarisme dimana-mana.³

Manusia yang hidup berkelompok dalam sebuah entitas memerlukan sistem pemerintahan untuk menjaga ketertiban serta ketentraman di dalam kelompok masyarakat tertentu. Pada hakikatnya, sistem pemerintahan adalah pelayanan untuk masyarakat, dan orang-orang yang berada dalam tatanan tersebut bertugas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkannya setiap yang dipimpin itu tetap berada dalam satu kesatuan. Pemerintahan sejatinya adalah sebuah organ yang memiliki wewenang untuk memproses pelayanan publik serta kewajiban memperoleh pelayanan publik dan kewajiban mendapatkan pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya yakni pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.⁴ Muhadam Labolo mengartikan pemerintahan sebagai upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.⁵

Dewasa ini, manusia mengenal dan menerapkan berbagai macam sistem pemerintah untuk dianut dan diaplikasikan pada setiap teritorial mereka sesuai dengan apa yang masyarakatnya kehendaki. Jimly Asshiddiqie menyederhanakan sistem pemerintahan menjadi empat model, yakni model Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Swiss. Amerika Serikat menganut sistem presidensial. Hampir semua negara di benua Amerika, kecuali beberapa seperti Kanada, Meniru Amerika Serikat dalam hal ini. Di benua Eropa dan kebanyakan negara Asia pada umumnya menggunakan model Inggris, yaitu sistem parlementer. Akan tetapi, Prancis memiliki model tersendiri yang bersifat campuran atau yang biasa disebut hybrid system. Pada umumnya negara-negara bekas jajahan Prancis di

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011): h. 98.

⁴ Talizidhuhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003): h. 6.

⁵ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2007): h. 24.

Afrika menganut sistem campuran itu. Selain ketiga model itu, yang agak khas adalah Swiss yang juga mempunyai Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi mereka itu dipilih dari dan oleh tujuh orang anggota Dewan Federasi untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun. Sebenarnya ketujuh orang anggota Dewan Federal itulah yang secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Swiss ini biasa disebut sebagai Collegial system yang sangat berbeda dengan tradisi presidentialisme atau parlemtarisme dimana-mana.⁶

Keberadaan suatu kerajaan di sebuah tempat mengindikasikan bahwa ada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, dan masyarakat yang sudah mengenal sistem pemerintahan untuk mengatur kehidupannya masing-masing, terlepas apakah kerajaan tersebut sudah kompleks atau masih berbentuk kerajaan yang sederhana dan belum memiliki peradaban. Menurut catatan kronik Mandar, Kerajaan Balanipa adalah Kerajaan yang didirikan oleh I Manyumbungi pada awal abad XVI.⁷ Dalam perkembangannya Kerajaan Balanipa terus menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan lain diwilayah sekitarnya.

Kerajaan Balanipa berdiri berdasarkan kesepakatan dari persekutuan Appeq Banua Kayyang yang meliputi empat negeri, yaitu Napo, Samasundu, Mosso dan Todang-todang. Proses berdirinya kerajaan Balanipa dan terbentuknya Bangsa Indonesia hampir serupa, yakni terdiri dan bersatu dari persekutuan berbagai kerajaan-kerajaan lokal yang menggabungkan diri dalam satu kesatuan untuk mengusir penjajah, dan kelak membentuk sistem pemerintahan presidensial sampai sekarang. Sebagai sebuah kerajaan Islam, yang dibawa oleh seorang da'i bernama Abdurrahim Kamaluddin, maka Islam kian tersiar di kalangan bangsawan kerajaan disusul para raja yang memberikan himbuan kepada para masyarakat kerajaan Balanipa agar memeluk agama Islam. Maka menarik untuk diketahui bagaimana Kerajaan Balanipa dalam perspektif Siyasa Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan historis dan berusaha untuk mengungkap bagaimana

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011): h. 98.

⁷ Ahmad M. Sewang, *Peranan Orang Melayu Dalam Perkembangan Islam Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Pres, 2013): h. 56.

sistem Kerajaan Balanipa di Polewali Mandar utamanya dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, kemudian penulis akan menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.⁸ Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya atau yang menjadi obyek dari penelitian yang langsung ditinjau di lapangan dengan cara wawancara dan tanya jawab pada narasumber atau informan untuk memperoleh keterangan yang jelas yang didukung oleh data kualitatif, kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui referensi kepustakaan (buku-buku) yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berkaitan dengan data primer yang terjadi dilapangan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Sosial Kerajaan Balanipa

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun¹⁰. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid.¹¹ Abdurrahman adalah nama kecilnya, dalam keluarganya di kenal dengan nama Abu Zaid, waktu menjabat sebagai qadi di Mesir beliau mendapat gelar waliuddin. Dan populer dengan nama Ibnu khaldun. Dalam karyanya at-Ta'rif, Ibnu Khaldun menerangkan tentang dirinya dan garis keturunannya sebagai Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Jabir Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Khaldun.¹²

Sebelum masa kerajaan wilayah dikawasan Sulawesi dipimpin oleh para pemimpin lokal. Para pemimpin lokal tersebut dikenal dengan Tomokaka dimana Tomokaka itu memimpin wilayah atau benua yang ada di Sulawesi. Dalam kepemimpinan Tomakaka ini sudah menunjukkan eksistensinya sebelum adanya kerajaan Balanipa. Wilayah yang

⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007): h. 6

⁹ Rully Irawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Cet. II Bandung: PT Refika Aditama, 2016): h. 67

¹⁰ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 391-394

¹¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* Terj. Masturi Irham, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 1079

¹² Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 391-394

dipimpin oleh Tomokaka sebelum pemerintahan Mara'dia yaitu Napo, Samasundu, Mosso dan Todatodang. Dari empat wilayah besar tersebut membentuk ikatan Appe Benua Kayyang atau empat negari besar. Kemudian hal tersebut menjadi cikal bakal kerajaan Balanipa. Pemerintahan di bawah kekuasaan Tomokaka ini mengalami perubahan-perubahan sosial yang semakin kompleks. Sehingga Tomokaka yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi semakin tidak mampu mengendalikan dan mengatur semua urusan masyarakat.

Sehingga dibuatlah pembagian wewenang dengan menunjuk tokoh tertentu untuk menangani, segala urusan yang bersifat fundamental. Pembagian wewenang tersebut diantaranya yaitu, pejabat yang disebut Tomabubeng (Orang tua) yang mengatur masalah lahan. Selain itu, dipilih pejabat yang disebut So'bo, yaitu pemegang otoritas yang menangani masalah tanaman. Belakangan, dibentuk lagi jabatan Andongguru yang bertugas mengajarkan berbagai keterampilan, serta jabatan Ponggawa dan Poambi yang masing-masing menangani masalah ekonomi dan ritual masyarakat. Namun pada kenyataannya Appeg Banua Kaiyang dibawah pimpinan Tomokaka tidak mampu menyelesaikan konflik. Sehingga mereka mencari sosok baru yang dianggap dapat dan mampu menyelamatkan rakyat dan keutuhan wilayah mereka dari ancaman kekuasaan Tomokaka. Pencarian itu tertuju kepada I Manyumbungi yang pada saat itu berada di Kerajaan Gowa. Mayumbungi adalah salah seorang keturunan Pappuangan Napo di Kerajaan Gowa yang sedang menjadi panglima perang untuk membantu Empat Negeri Besar menghadapi ancaman dari luar. Kemudian Mayumbungi tersebutlah yang menjadi Mara'dia atau Raja Balanipa yang pertama.

Atas lahirnya kerajaan Balanipa menjadi awal dari lahirnya sistem pemerintahan Mara'dia. Para raja mandar tidak lagi bergelar Tomokaka, namun berganti menjadi Mara'dia. Kemudian setelah kepemimpinan Mayumbangi, selanjutnya diteruskan oleh anaknya Tomepayung. dalam pemerintahannya papuangan dari keempat negeri besar dijadikan lembaga adat tertinggi yang bertugas dalam mengangkat dan memberhentikan Mara'dia. Selain itu Tomepayung juga membentuk sepuluh lembaga adat (Sappulo Sokkoq Adaq) yang akan membantu tugas Mara'dia dan angkatan perang yang dinamakan Appe Jannangang.

Pada umumnya masyarakat Kerajaan Balanipa memiliki tiga nilai sosial dalam menjalani hidup, yaitu angga, siri dan lokko. Adapun ketiga nilai tersebut memiliki keterikatan secara sosial dan norma. Angga merupakan nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, serta hal yang pantas dan tabu di dalam hubungan kemasyarakatan. Pembentukan hukum adat Kerajaan Balanipa didasari oleh angga. Proses melaksanakan dan mempertahankan angga disebut sebagai siri. Ukuran dari nilai diri atau harga diri seseorang ditentukan dari siri. Mereka yang tidak menerapkan nilai dari angga dan siri disebut sebagai lokko. Siri dipahami sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang baik secara pribadi. Sebaliknya, lokko dipahami sebagai harga diri dalam pandangan harkat dan martabat seseorang dalam marga atau masyarakat umum.

Sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, masyarakat Balanipa tidak mengenal sistem stratifikasi sosial. Setiap perselisihan diselesaikan dengan hukum rimba dengan kekuatan sebagai penentu pihak yang menang. Pihak yang berselisih harus bertarung di arena pertarungan yang disebut bala tau dengan disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kekacauan, sehingga dibentuklah kelompok pengadilan hukum yang disebut tomawuweng. Tugasnya adalah untuk menentukan pihak yang bersalah dalam suatu perselisihan. Para tomawuweng ini harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum adat dan angga. Setelah permasalahan di masyarakat semakin banyak, mereka kemudian menunjuk seorang pemimpin yang disebut Tomakaka. Tugasnya adalah menjamin keamanan dan mempersatukan masyarakat dalam keteraturan serta melindungi mereka dari ancaman luar. Dalam perkembangannya, para Tomakaka menjadi penguasa-penguasa kecil yang memerintah dengan bantuan Tomawuweng. Dalam kepemimpinan para Tomakaka, stratifikasi sosial hanya terdiri dari kelompok orang bebas (tau maradeka) dan orang-orang pilihan (tau pia)

2. Sistem Kerajaan Balanipa sebelum NKRI Terbentuk

Pada periode kepemimpinan Manyambungi adalah awal dari munculnya sistem pemerintahan demokrasi di Mandar. Presistensi yang terjadi saat kerajaan passokorang berkuasa di Mandar memicu seluruh aktivitas politik pada masa itu. Dimana masyarakat yang dulunya hanya tunduk pada pemerintahan totalitarnya Tomakaka akhirnya melakukan perlawanan. Sehingga setelah keberhasilan tersebut, dibawah kepemimpinan

Manyambungi yang sudah diangkat menjadi mandar pertama, kerajaan balanipa pun lahir dengan gagasan konsep kepemimpinan Mara'dia.

Terbentuknya kerajaan tersebut memberikan dampak yang besar bagi wilayah Mandar. Salah satu yang dilakukan oleh Manyambungi yaitu membentuk banua kaeang. Kaeang tersebut memiliki arti rumah besar dalam suatu wilayah kerajaan balanipa yang sekaligus memiliki pengaruh dan legitimasi kuat. Wilayah tersebut meliputi banua kaeang Napo, Samasundo, Mosso, dan Todang-todang atau dikenal dengan Appe Banus Kaiyyang. Keempat wilayah tersebut yang kemudian menjadi penentu dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan balanipa. Setelah pengangkatan seorang raja (mara'dia). Maka dilakukan pembentukan dan pelantikan semua perangkat pemerintah mulai dari matoa (perdana menteri), Malolo (panglima perang), dua orang Pa'bicara (penasehat), dan 8 pappuangan, 2 pa'bicara dan 8 pappuangan tersebut dikenal sebagai "Ada Sappulo Sokko".

Ditinjau secara struktural, sistem pemerintahan tersebut merupakan cerminan sistem pemerintahan negara. Dimana *Banua* sebagai Lembaga tertinggi kerajaan dikenal juga dengan sebutan Lembaga *Hadat*. Apabila di refleksikan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia maka posisi *Hadat* sebagaimana tugas dari MPR sebagai lembaga negara mempunyai tugas untuk melantik bahkan menurunkan seorang pemimpin. *Hadat* sebagai lembaga kerajaan juga memiliki wewenang yang sama dengan MPR bahkan segala kebijakan yang berhubungan dengan kerajaan, harus melalui persetujuan dari lembaga ini. Begitu pula ketika seorang raja ingin diangkat dan diturunkan dari jabatannya.

Sistem pemerintahan kerajaan juga merujuk pada konsep trias politica dimana memiliki 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhklis Hanna bahwa peran kekuasaan legislatif yaitu membuat undang-undang, melaksanakan UU serta mengadili atas pelanggaran UU. Selain itu sistem pemerintahannya juga menerapkan sistem pemisahaan kekuasaan. Kemudian fungsi dari legislatif yaitu bahwa keterwakilan rakyat dijalankan oleh *Appe Banua Kayyang*. Kedudukan *Appe Banua Kayyang* selain menjadi pemangku adat di pusat pemerintahan kerajaan, juga sebagai pemimpin *banua/kampung*. Dimana mereka tetap menjalankan pemerintahan atau kepemimpinan atas *banua* asal masing-masing, di samping jabatan mereka sebagai pemangku adat di pusat pemerintahan.¹³

¹³ H. Muhklis Hannan dosen Universitas Al Asyariah Mandar dan budayawan, Kabupaten Poliwali Mandar, 28 Januari 2022.

3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Sistem Kerajaan Belanda

Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai kajian yang perlu difahami secara akademik. Hal ini dikarenakan menyediakan konsep yang mengkonstruksikan antara kehendak wahyu dan pemahaman manusia. Keseimbangan tersebut menjadikan hukum yang diputuskan itu mempunyai nilai-nilai secara dinamik. Definisi secara Syari'ah berasal dari bahasa Arab, yang dalam penggunaan biasanya didefinisikan sebagai jalan yang lurus, tempat keluar sesuatu dan jalan ke tempat air minum. Penjelasan terkait definisi tersebut adalah air sebagai sarana penghubung kepada keberlangsungan kehidupan manusia. Definisi lain adalah jalan yang lurus sebagai sesuatu yang membawa manusia ke arah kebaikan. Al-Qur'an telah memberikan penjelasan terkait Siyyasah Syari'ah sebagai segenap peraturan hidup dapat berupa perintah dan larangan dalam nilai dan ajaran agama yang mencakup aspek keimanan, perundangan dan akhlak.

Dalam definisi oleh Muhamad Yusuf Musa adalah segala hal yang disyari'atkan oleh Allah melalui perpaduan antara wahyu dan dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun cakupan dari pengertian tersebut adalah akidah dan keimanan, akhlak-akhlak yang mulia dalam perhubungan sesama anggota masyarakat dan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf sama ada halal, haram, wajib, sunat dan harus yang dikenali sebagai fiqh dan juga perundangan Islam. Demokratisasi yang paling nampak dari kebudayaan orang-orang Balanipa adalah sistem pemerintahan kerajaan Balanipa yang tidak mewariskan tahta raja secara turun temurun. Proses pemilihan raja dilaksanakan dengan cara dipilih dan disetujui oleh *Appe Banua Kayyang* yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Setiap orang Mandar yang memiliki kemampuan, prestasi dan etika yang baik dan mumpuni pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi raja Balanipa. Dalam hal ini kerajaan Balanipa sudah mengenal sistem siyasah syar'iah. Sistem pemilihan kepala negara secara musyawarah sesuai dengan konsep siyyasah.

Pada ranah pemilihan pemimpin (*mara'dia*) kerajaan Balanipa menggunakan konsep musyawarah dari pada keturunan. Kelayakan menjadi *mara'dia* adalah yang memiliki kemampuan, prestasi dan etika yang baik dan mumpuni pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi raja Balanipa. I Manyambungi dipilih sebagai *mara'dia* karena perubahan besar sebagai panglima perang. Atas dasar musyawarah bersama, maka permintaan untuk menjadi *mara'dia* di Kerajaan Balanipa dipenuhi. I Manyambungi sebagai tokoh besar kerajaan Balanipa sekaligus sebagai raja pertama menegaskan hal ini sebelum beliau mangkat. I Manyambungi secara tegas memberikan arahan bahwa setelah dia wafat,

bahkan anak cucunya sekalipun jika tidak memiliki kemampuan dan etika yang baik maka jangan pilih dia menjadi raja/*maraqdia*. Secara lengkap amanah itu berbunyi, bahwa

“*Madondong duambongi anna matea, mau ana’u mau appo’u da’ muannai menjari mara’dia mua tania tonamassayanni lita’na to massayanni pa’banua. Da’ muannai dai di peuluan, mua masuanni pulu-pulunna, mua maddori kedona, apa iyamo ta’u namarruppu-ruppu lita’*.”

Artinya manakala besok lusa saya mangkat, walaupun anak dan cucu saya, janganlah hendaknya diangkat menjadi raja kalau bukan dia orang yang cinta kepada tanah air dan rakyat kecil. Jangan pula diangkat seorang calon raja bila ia mempunyai tutur kata yang kasar, berbuat, bertindak kaku dan kasar pula, karena orang yang seperti itulah yang akan meng-hancurkan negeri

KESIMPULAN

Kerajaan Balanipa dimulai dengan kepemimpinan Mayumbangi sebagai Mara’dia pertama. Sebelum kemerdekaan, pemilihan raja berdasarkan adat dan tidak didasarkan pada pewarisan keturunan. Tiga fase kepemimpinan di Balanipa Tomakaka, Pappuangan, dan Mara’dia menunjukkan kontinuitas struktur pemerintahan yang demokratis. Sistem ini mengikuti konsep trias politica, dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keputusan penting seperti pengangkatan raja dan pelantikan perangkat pemerintah, termasuk perdana menteri (*matoa*), panglima perang (*Malolo*), penasehat (*Pa’bicara*), dan delapan Pappuangan, diambil oleh empat wilayah yang berpengaruh. Pandangan Siyasa Syar’iyah menggarisbawahi bahwa sistem ini sejalan dengan ajaran agama, menekankan kemaslahatan umat dan keutuhan wilayah, serta tidak memungut pajak dari rakyat. Mara’dia terpilih berdasarkan kemampuan, prestasi, nilai, dan akhlak, serta kesetiaan pada kerajaan, sesuai dengan hadits Bukhari tentang siyasa syar’iah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sewang Dan Ahmad Asdy, *Etika Dalam Kehidupan Orang Mandar* (Sulawesi Barat: Yayasan Mahaputra Mandar, 2010)
- Ahmad M. Sewang, *Peranan Orang Melayu Dalam Perkembangan Islam Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Pres, 2013)
- Ahmad Asdy, *Sosialisasi Siri: Etika Dan Estetika Di Mandar*, (Cet. I; Sulawesi Barat: Yayasan Mahaputra Mandar, 2009)
- Edwar L. Polinggomang, *Sejarah Dan Budaya Sulawesi Barat* (Makassar: De La Macca, 2012)
- Ilyas, “Islamisasi Di Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar, 2015)

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2007)
- Rully Irawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Cet. II Bandung: PT Refika Aditama, 2016)
- Samiang Katu, *Peta Islamisasi Dan Kristenisasi Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Thomas Gibson, *Islamic Narrative And Authority In Southeast Asia: From The 16th To 21st Century* Terj. Nurhady Sirimorok, *Narasi Islam Dan Otoritas Di Asia Tenggara: Abad Ke-16 Hingga Abad Ke-21*, (Cet. I., Ed. Indonesia, Makassar: Inninawa, 2012)
- Talizidhuhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)
- H. Muhklis Hannan dosen Universitas Al Asyariah Mandar dan budayawan Kabupaten Paliwali Mandar 28 Januari 2022